BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

. Berdirinya kelompok G20 tidak lepas dari kekecewaan masyarakat internasional karena G7 gagal menemukan solusi atas permasalahan ekonomi global saat itu. Saat itu, dianggap penting bahwa negara-negara berpenghasilan menengah dan negara-negara dengan pengaruh ekonomi sistemik harus terlibat dalam negosiasi untuk mencari solusi atas masalah ekonomi global.

G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB). G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999. Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur. (G20 Indonesia 2022)

G20 tidak memiliki Sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) yang ditetapkan secara consensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut Troika) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20. Kini, dunia kembali berada pada masa krisis multidimensional akibat pandemi

COVID-19. G20 sebagai kumpulan Ekonomi utama dunia, yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, memiliki kapasitas untuk mendorong pemulihan.(Anggarini 2021)

Untuk itu, sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung semangat pulih bersama dengan tema “Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diangkat oleh Indonesia, menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi COVID-19, memerlukan suatu upaya bersama dan inklusif, dalam mencari jalan keluar atau solusi pemulihan dunia.

Untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu:

1. Penguatan arsitektur kesehatan global

   Berkaca dari pandemi yang saat ini masih berlangsung, arsitektur kesehatan global akan diperkuat. Tidak hanya untuk menanggulangi pandemi saat ini, namun juga untuk mempersiapkan dunia agar dapat memiliki daya tanggap dan kapasitas yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan lain ke depannya.

2. Transformasi digital

   Transformasi digital merupakan salah satu solusi utama dalam menggerakkan perekonomian di kala pandemi, dan telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Untuk itu, Presidensi Indonesia akan berfokus kepada peningkatan kemampuan digital (digital skills) dan literasi digital (digital literacy) guna memastikan transformasi digital yang inklusif dan dinikmati seluruh negara.

3. Transisi energi

   Guna memastikan masa depan yang berkelanjutan dan hijau dan menangani perubahan iklim secara nyata, Presidensi Indonesia mendorong transisi energi menuju energi baru dan terbarukan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan.

Berlandaskan prinsip inklusivitas, Presidensi Indonesia turut mengundang negara-negara tamu dan organisasi internasional (invitees) untuk turut berpartisipasi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa inklusivitas ini adalah prioritas kepemimpinan Indonesia di G20, untuk mewujudkan “leave no one behind". (G20 Indonesia 2022 2022)

Visinya adalah Presidensi G20 yang bermanfaat bagi semua pihak, termasuk negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, serta kelompok rentan, dan tidak hanya demi kepentingan anggota G20 itu sendiri. Untuk itu, Indonesia pun memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin, termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Selain refleksi spirit of inclusiveness, hal ini juga memberikan representasi yang lebih luas kepada G20. Terdapat 9 (sembilan) negara undangan pada Presidensi G20 Indonesia, yaitu Spanyol, Ketua Uni Afrika, Ketua the African Union Development Agency-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Belanda, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Ketua The Caribbean Community (CARICOM), dan Ketua Pacific Island Forum (PIF).(G20 Indonesia 2022 2022)

Selain itu, terdapat juga 10 organisasi internasional undangan, yaitu Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), International Labour Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, World Health Organization (WHO), World Trade Organization (WTO), dan United Nations (UN).(G20 Indonesia 2022 2022)

Forum internasional G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. G20 dibentuk pada

1999 atas inisiasi negara anggota G7 (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang). Peran nyata G20 sebagai Penanganan Krisis Keuangan Global 2008, dimana ini menjadi salah satu kesuksesan terbesar G20, dimana dukungan G20 dalam mengatasi krisis keuangan global. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global, dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi, dalam skala sangat besaar. Selanjutnya adalah kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Melalui BEPS, saat ini 139 negara dan yurisdiksi bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Serta berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19 sebanyak > 5 triliun USD (Riyadh Declaration), penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan alat medis dan obat-obatan.(G20 Indonesia 2022 2022)

Indonesia menjadi G20 di tahun 2022, berbagai daerah tentunya memerlukan persiapan baik deri segi tata ruang perkotaan, lingkungan, dan pariwisata. G20 sendiri akan hadir di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Belitung. Daerah Belitung sendiri sebagai daerah pariwisata tentunya sudah terkena di kalangan masyarakat Indonesia, hanya saja perlu perkembangan yang jauh lebih baik guna menghadapi G20. Seperti tata ruang daerah wisata serta akses jalan tentu menjadi perhatian umum sebagai daerah pariwisata yang ingin bersaing di dunia internasional. Berdasarkan sudut pandang saya, Belitung memiliki potensi daerah wisata yang sangat berkualitas dan memiliki keindahan alam yang sangat bagus. Namun, dalam penerapan dalam tata kelola lingkungan serta nilai keindahan alam sedikit tercoreng akibat ketidakpedulian masyarakat, seperti banyak masyarakat buang sampah sembarangan,

kendaraan terkadang masuk ke area wisata. Perlu penataan yang jauh lebih baik untuk meningkatkan kualitas tempat wisata serta memiliki lingkungan yang lebih nyaman, bersih, dan aman. Daerah wisata di Belitung sendiri sebenarnya bisa dibilang menyaingi daerah wisata alam yang ada di Bali dan daerah lainnya, namun dengan kekurangan dalam penataan lingkungan itulah dimana wisata Belitung belum bisa menyaingi kualitas daerah wisata di Bali. Pemerintah daerah Kabupaten Belitung mulai membenahi satu persatu untuk mempersiapkan G20 mulai dari renovasi jalan raya, renovasi jembatan-jembatan, renovasi serta penataan ruang yang baru bagi daerah wisata, guna untuk menarik perhatian para wakil pemerintah dari setiap negara yang tiba di daerah Belitung.

Pasca G20 ini sendiri akan membuka jalannya pariwisata sesuai pada agenda persiapan sebelumnya guna menghadapi G20, dengan begitu renovasi akses bahkan tempat-tepat umum bahkan wisata berawal dari persiapan G20 serta pariwisata menjadi dongkrak baru bagi pariwisata yang baik. Dampak positif bagi Belitung sendiri dengan adanya G20 ini bisa memperkenalkan pariwisata Belitung ke seluruh dunia, diharapkan dengan menambah dan menggenjot perekonomian yang ada di Belitung. Selain itu, hal ini bisa membantu persiapan pariwisata di Belitung menuju level internasional

B. Perumusan Masalah

1. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata?
2. Bagaimana konsep tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sektor pariwisata pasca G20?
3. Apa saja yang telah dicapai oleh para *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Belitung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja dampak bagi sektor pariwisata pasa G20
2. Untuk mengetahui kinerja dan persiapan *stakeholders* dalam pengembangan sektor pariwisata pasca G20
3. Untuk mengetahui tata kelola kolaboratif seperti apa pada pengemabngan pariwisata serta pencapaiannya

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam persiapan sebuah daerah dalam menghadapi acara besar yang bersangkutan dengan dunia internasional
2. Sebagai pengembangan bagi studi Ilmu Pemerintahan dalam referensi bagi program studi
3. Sebagai referensi dari pengembangan di sektor pariwisata Kabupaten Belitung dan masukan bagi Dinas Pariwisata, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

E. Kajian Teori

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan cara yang dilakukanoleh peneliti dalam menulis penelitiannya untuk menghindari plagiasi, serta penelitian terdahulu ini digunakan sebbagai referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya

No	Peneliti	Judul	Rangkuman
1	Putu Nomy Yusinta	*Collaborative Governance* dalam Kebijakan Pembangunan	Dalam jurnal ini mengatakan bahwa pemerintah kolaboratif adalah kemitraan publik dan swasta, dimana

		Pariwisata di Kabupaten Gianyar	pada dasarnya merupakan inisiasi kolaboratif antara negara dan non-negara, aktor komersial dan *non-profit* yang lahir dari pragmatisme.
2	Muchamad Zaenuri	Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata dari *Adaptive Governance* Menuju *Collaborative Governance*	Dalam jurnal ini beliau mengatakan, prinsip governance dapat diimplementasikan dengan nuansa adaptif, semua pilar bekerja dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.
3	Deden Saputra	Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat	Konsep Collaborative Governance suatu proses yang mempunyai sifat bertransformatif, proses transformasi kolaboratif bermula dari kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lain dengan sifat komando, pada tahap ini pemerintah mempunyai kontrol yang kuat, pemangku kepentingan lain tidak terlibat dalam pengambilan keputusan (hirarki).
4	Devi Meri Yanti	*Collaborative Governance* Sebagai Langkah Pengembangan	8 kriteria keberhasilan dalam Collaborative Governance adalah 4. Network Structure

		Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Kasus Ekowisata Bahari di Pulau Pisang)	5. Commitment to a Common Purpose 6. Trust Among the Participants 7. Governance 8. Access to Authority 9. Distributive Accountability/ Responsibility 10. Information Sharing 11. Access to Resources
5	Wiwiek Rukmi Dwi Astuti	Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19	Dalam jurnal ini mengatakan bahwa G20 merupakan pertemuan antar-antar negara dimana mereka akan fokus mengkoordinasikan upaya melawan dampak dari COVID-19 baik dari sektor ekonomi dan sosial
6	Yan Megawandi	Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan *Whole of Government*	Pengelolaan sektor yang memiliki banyak keterlibatan pihak-pihak seperti pariwisata dimaksud sangat sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh pemerintah bagi terwujudnya kepemimpinan yang bersifat kolaboratif yaitu pendekatan Whole of Goverment (WOG)

7	Reza Ahmad Kurniawan	Usaha Pemilihan Pariwisata Saat Situasi Pandemi Covid-19	Selama pandemi COVID-19 Indonesia mengalami keterpurukan dalam sektor Pariwisata dimana sekitar 11% pekerja Indonesia bekerja di sektor pariwisata dan pariwisata berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 4%
8	Desy Tri Anggarini	Upaya Pemulihan Industri Pariwisata dalam Situasi Pandemi COVID-19	Dalam jurnal ini mengatakan dimana seluruh negara G20 akan mengalami resesi dan prediksi mengatakan negara yang masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif yaitu Indonesia, India, dan Cina.
9	I Gede Juni Pratama. Wayan Ardani, Ida Ayu Sasmita	Pemanfaatan Presidensi G20 sebagai Sarana *Marekting* dan *Branding* Ekonomi Kreatif pada Era Pandemi Covid-19	G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian dunia, 80% investasi global, 75% perdagangan internasional, 60% populasi dunia.
10	Ranggi Ade Febrian	*Collaborative Governance* dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi)	Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini dilihat dari konsep *Collaborative Governance* adalah kurang berjalannya *system context* yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, *drivers* yang dilihat dari elemen *leadership* yang sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan di desa.

Tabel 1. 1.Penelitian Terdahulu

Pariwisata

Definisi pariwisata sendiri memiliki banyak sudut pandang dalam pemahamannya. Dapat dikatakan banyak ahli terbilang memiliki pengertian tentang pariwisata yang berbeda-beda, namun memiliki satu makna yang sama yaitu pariwisata. Menurut Suwantoro (2004), pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya (Sugiama 2011). Sedangkan menurut A.J. Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Sedangkan menurut Sugiama, (2011) pariwisata adalah rangkaian aktivitas, dan penyediaan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan penyediaan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukannya hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud istirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Youti, (1991:103). Pariwisata berasal dari dua kata yaitu Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan Wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang memiliki sinonim kata "*reavel*" dalam bahasa Inggris. Maka dari itu kata "pariwisiata" sendiri dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ketempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*Tour*".

Robert McIntosh bersama Shashikant Gupta mencoba mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan,

bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya. Pendapat yang berbeda dipaparkan oleh Soekadijo bahwa pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Semua kegiatan dilakukan untuk mendatangkan para wisatawan, seperti pembuatan hotel, pemugaran objek budaya, pembuatan pusat rekreasi penyelenggaraan pariwisata, penyediaan angkutan dan lain sebagainya yang semua itu disebut kegiatan kepariwisataan.

Menurut Oka A. Yoeti, 2001:xxii berpendapat bahwa kepariwisataan menggambarkan beberapa bentuk perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan berbagai macam kegiatan. Pariwisata sebagai suatu gejala yang terwujud dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut jumlah orang yang bepergian:
    a. Pariwisata Individu, yaitu hanya seorang atau satu keluarga yang bepergian,
    b. Pariwisata Rombongan, yaitu sekelompok orang yang biasanya terikat oleh hubungan-hubungan tertentu kemudian melakukan perjalanan bersama-sama.
2. Menurut maksud bepergian:
    a. Pariwisata Rekreasi atau Pariwisata Santai, Tujuan awal dari pariwisata adalah untuk memulihkan kemampuan fisik dan mental setiap pelancong dan memberinya kesempatan untuk bersantai di tempat hiburan dari kebosanan dan kelelahan kerja. .
    b. Pariwisata Budaya, yaitu pariwisata yang bermaksud untuk memperkaya informasi dan pengetahuan tentang negara lain dan untuk memuaskan

kebutuhan hiburan. Dalam hal ini termasuk pula termasuk pula kunjungan ke pameran-pameran dan fair, perayaan-perayaan adat, tempat-tempat, cagar alam, cagar purbakala dan lain-lain.

c. Pariwisata Pulih Sehat, yaitu yang untuk memenuhi kebutuhan perawatan medis di daerah tersebut atau pilihan penyembuhan lainnya. Contoh dari wisata ini adalah rekreasi ke sumber air panas, tempat mandi lumpur yang kuat, perawatan dengan air mineral yang kuat dan lain-lain. Pariwisata ini mensyaratkan syarat-syarat tertentu, antara lain kebersihan, ketenangan dan taraf hidup yang layak

d. Pariwisata Sport, yaitu pariwisata, yang memuaskan kegiatan manusia seperti memancing, berburu satwa liar, menyelam, ski, balap, dan mendaki gunung.

e. Pariwisata Temu Wicara, yaitu berwisata yang mencakup pertemuan ilmiah, profesional, dan bahkan politik. Jenis pariwisata ini membutuhkan ketersediaan fasilitas konferensi di negara tujuan dan faktor penting lainnya seperti lokasi yang strategis, akses yang mudah, iklim yang cerah, dll.

3. Menurut alat transportasi
   a. Pariwisata darat
   b. Pariwisata tirta
   c. Pariwisata dirgantara
4. Menurut letak geografis

a. Pariwisata Domestik Nasional, yang menunjukkan arus wisata yang dilakukan oleh warga dan penduduk asing yang bertugas disana, yang terbatas dala suatu negara tertentu
b. Pariwisata Regional, yaitu kepergian wisatawan terbatas pada beberapa negara yang membentuk suatu kawasan pariwisata
c. Pariwisata Internasional, yang meliputi gerak wisatawan dari suatu negara ke negara lain di dunia.

Dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan ada beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu:

A. Kesejahteraan tuan rumah

Pariwisata harus mampu mengentaskan kemiskinan tuan rumah. Dengan kata lain, pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat sekitar dapat sejahtera.

B. Ekonomi

Pendapatan pariwisata adalah ukuran pengembangan pariwisata. Apa saja tunjangan yang diperoleh di hari kerja, pendapatan liburan (musiman), dan cara menghtung pendapatn karyawan. Dan pendapatan dari pariwisata sendri bisa digunakan untuk renovasi atau meng-*upgrade*-kan tempat wisata.

C. Perlindungan Aset Budaya

Aset budaya merupakan hal yang penting bagi masyarakat, sehingga keberadaannya harus dilindungi. Perlindungan aset budaya merupakan salah

satu indikator pengembangan pariwisata yang harus diperhatikan. Jangan sampai aset budaya dari kawasan wisata tersebut dirusak atau bahkan dicuri

D. Kelestarian Alam

Kelestarian alam adalah salah satu indikator pengembangan pariwisata. UNWTO dalam buku berjudul *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook* (2004) indikator kelestarian alam melingkupi penggunaan energi, penggunaan air, pengelolaan sampah dan limbah, emisi karbon, juga pengelolaan kebersihan lingkungan.

Collaborative Governance

Pemerintah tidak hanya bergantung pada kapasitas internalnya untuk mengimplementasikan kebijakan dan program. Keterbatasan kemampuan, sumber daya dan jaringan pendukung pelaksanaan program atau kebijakan mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan mitra pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dapat dimasukkan oleh program atau politik. (Purwanti, 2016:174) Secara umum dijelaskan bahwa Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004;Hartman et al.,2002). Menurut Ansell dan Gash (2007:544) mendefinisikan Collaborative Governance adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karekteristik, antara lain :

a. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
b. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik.
c. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merajuk pada aktor-aktor publik.
d. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersamasama.
e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
f. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Pengertian ini dapat diartikan bahwa forum itu ada dalam suatu hubungan formal, sehingga hanya disebutkan kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dan aktor non publik. Berbeda dengan definisi co-management yang dijelaskan oleh Agrawal dan Lemos (2007) (dalam Balogh, S, et al, 2011:3) Memperjelas definisi dari collaborative governance, yang tidak terbatas pada aktor pemerintah dan non-pemerintah, tetapi juga menegaskan adanya “multi-stakeholder governance”, yang meliputi dan berbasis pada sektor swasta, masyarakat dan masyarakat sipil atas sinergi. . peran pemangku kepentingan dan rencana persiapan bersifat lintas sektor, baik sektor publik dan swasta maupun kerjasama swasta dan sosial. Definisi yang hampir mirip dikemukakan oleh Balogh (2011:2) Tata kelola kolaboratif adalah suatu proses dan struktur dalam arah dan perumusan keputusan politik publik, yang secara konstruktif melibatkan aktor-aktor di berbagai tingkatan

dalam kaitannya dengan administrasi dan/atau badan publik, lembaga swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan publik. tidak dapat dicapai jika salah satu pihak melakukannya sendiri. Sekaligus Robertson dan Choi (2010) (dalam Kumorotomo, 2013:10) mendefinisikan manajemen kolaboratif sebagai proses kolektif dan adil di mana setiap peserta memiliki otoritas pengambilan keputusan yang signifikan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk mempertimbangkan aspirasi mereka dalam proses tersebut. Dwiyanto menjelaskan panjang lebar bahwa dalam visi kolaboratif, tujuan dan strategi disampaikan, dalam visi kolaboratif, tujuan, strategi, dan tindakan dibagi antara pihak-pihak yang masing-masing memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan kekuasaan. membuat keputusan secara mandiri dan mengelola organisasi mereka bahkan jika mereka tunduk pada kesepakatan bersama. (Dwiyanto, 2011:251) Menurut definisi Dwiyanto, Sink menjelaskan kerja sama sebagai suatu proses di mana organisasi-organisasi yang tertarik pada masalah tertentu mencoba mencari solusi yang diputuskan bersama untuk mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai sendiri. Manajemen kolaboratif didasarkan pada masalah atau masalah tertentu yang diselesaikan bersama antara para pihak. Pihak-pihak tersebut tidak terbatas pada organisasi pemerintah dan non-pemerintah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, masyarakat sipil berpartisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diawali dengan keterbatasan keterampilan, sumber daya dan jaringan kedua belah pihak yang memungkinkan kerjasama menggabungkan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong tercapainya tujuan bersama. Dalam kerjasama, dalam

perumusan tujuan, visi dan misi, kesamaan standar dan nilai, kedudukan kedua belah pihak adalah setara, yaitu H. kekuasaan untuk membuat keputusan independen, bahkan ketika terikat oleh kesepakatan bersama. (Febrian 2016)

Menurut DeSeve (2007) dalam (Syamsul 2018) untuk men-gukur keberhasilan collaborative governance dapat diukur melalui delapan indikator yaitu, (1) Network structure, (2) Commitment to a common purpose, (3) Trust among the participants, (4) Govern-ance, (5) Access to authority, (6) Distributive accountability atau responsibility, (7) Information sharing dan (8) Access to resources

Collaborative Governance dalam Pengembangan Pariwisata

Dalam mengembangkan sektor pariwisata, pemerintah tidak dapat menjalankan pekerjaannya secara indepent, perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan sektor publik ddan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pemerintah pada era reformasi birokrasi, karena dengan hal tersebut dapat membangun harmonisasi dan sinergi cara kerja yang harus dilakukan serta membentuk suatu hubungan yang berkesinambungan.

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki implikasi bahwa semua pihak yang terlibat atau dilibatkan mempunyai tanggungjawab yang sama untuk keputusan yang diambil, oleh karena itu kolaborasi memiliki syarat bahwa pihak-pihak yang terlibat harus memiliki satu visi dan misi dan memiliki kekuatan yang sama dalam pengambilan keputusan

Dalam penerapaannya pada pengembangan pariwisata, pemerintah berkolaborasi dengan pihak masyarakat serta antar pemerintahan itu sendiri. Sektor pariwisata tidak akan jauh-jauh dalam pengembangannya untuk peerapan tata kelola pemerintahan kolaboratif

itu sendiri. Dalam beberapa kasus tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata melibatkan pemerintah daerah, dinas pariwisata, dan masyarakat.

F. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual tak lain merupakan pemikiran penulis yang akan memaparkan sebuah konsep secara singkat dan jelas. Maka dari itu definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pariwisata

Pariwisata merupakan individu dimana mereka melakukan perjalanan ke tempat tertentu dan berekreasi di suatu tempat, dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan merelaksasikan raga dan jiwa sebuah individu. Seseorang yang melakukan perjalanan wisata atau berpariwisata menggunakan alat trnsportasi untuk menempuh teempat rekreasi mereka

b. Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan sebuah proses atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dngan melibatkan kerjasama kolaboratif dengan berbagai elemen dan instansi guna untuk keberhasilan program dan membahas penyelsaian sebuah masalah

G. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Collaborative Governance	Struktur Jejaring	Penguatan antara kelembagaan/kolaboratif antar *stakeholders* dalam pengembangan sektor pariwisata

	Komitmen Terhadap Tujuan	Penguatan tujuan bersama dalam pengembangan sektor pariwisata pasca G20
	Kepercayaan diantara Partisipan	Pelaksanaan program kerja atau kebijakam dari masing-masing *stakeholders*
	Tata Kelola Pemerintah	Akses data yang mudah bagi pemerintah, swasta dan LSM terkait data perkembangan sektor pariwisata pasca G20
	Akses terhadap Kekuasaan	Landasan hukum dan standarisasi dalam kebijakam penngembangan sektor pariwisata
	Pembagian Distribusi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas	Proses perencanaan hingga evaluasi terkit kondisi terkini serta rancangan untuk perkembangan pariwisata yang lebih maju
	Berbagi Informasi	Koordinasi antar *stakeholders*
	Akses pada Sumber Daya	Fasilitas yang memadai dan lengkap

Pariwisata	Kesejahteraan masyarakat	Pariwisata harus bisa memberantas kemiskinan bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi destinasi wisata
	Ekonomi	Penghasilan dari pariwisata merupakan indikator dalam pengembangan pariwisata.
	Perlindungan aset budaya	Indikator ini merupakan hal penting bagi pariwisata, bagaimana pariwisata sebagai alat untuk memperkenalkan kebudayaan daerah setempat
	Kelestarian alam	Pelestarian alam juga penting dimana sebuah lokasi destinasi wisata harus bersih dari sampah, emisi karbon dan penjagaan kelestarian lingkungan

Tabel 1. 2.Definisi Operasional

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah kegiatan dimana seseorang melihat kasus secara garis besar, kemudian memecahkan kasus tersebut dengan teknik observasi,

wawancara dan kuisioner. Menurut Soerjono Soekanto, beliau mengatakna bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsisten yang mana tujuannya untuk mengungkap suatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Sedangkan menurut Hill Way dalam bukunya berjudul "*Introduction to Research*" mendefinisikan penelitian yaitu metode penelitian yang secara menyeluruh dan hati-hati memeriksa semua fakta yang dapat dipercaya tentang masalah yang diberikan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian kepada Hadi Sutrisno yang menyatakan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Jenis penelitian yang akan saya ambil adalah melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti akan mewawancarai narasumber Penelitian kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993: 89) mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi dan format Grounded research. Berbeda dengan pendapat Sugiono (2005) yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Secara sederhana, dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi si objek penelitian. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian

yang mana menggunakan lebih banyak tulisan deskripsi dan obyektif dari peneliti dengan menggunakan sedikit angka-angka atau rumus.

2. Lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian sendiri menurut studi kasus, peneliti akan mengambil data di daerah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Jenis Data

A. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap obyek yang akan diteliti. Pada kasus ini, peneliti akan mewawancarai pengurus Dinas Pariwisata, Masyarakat, dan *stakeholder* yang berperan langsung dalam sektor pariwisata di daerah Kabupaten Belitung.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dengan oleh peneliti melalui jurnal atau artikel dari penelitian terdahulu, buku-buku, dan sebuah dokumen atau arsip yang digunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian ini. seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dokumentasi hasil G20 yang dilaksanakan September kemarin, rencana kerja program dinas pariwisata Kabupaten Belitung

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau peneliti terhadap narasumber, yang bertujuan agar peneliti mendapatkan sebuah data untuk menjawab sebuah masalah dan kesimpulan bagi latar belakang masalah sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Pariwisata, pihak pemerintah kabupaten Belitung

B. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap obyek sebuah tempat yang akan diteliti oleh peneliti guna memperoleh informasi. Pada penelitian ini, obyek yang akan di observasi adalah tempat wisata, pelabuhan dan bandara

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi di berbagai daerah wisata di Belitung, seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjug Kelayang, Pantai Tanjung Pendam

C. Dokumentasi

Pada penelitian ini, sebagai bukti bahwa peneliti melakukan observasi maka diperlukan dokumnetasi, berupa foto, atau video. Dokumentasi merupakan hal yang paling dalam sebuah peneltian dalam meneliti, agar menghindari perbuatan kecurangan berupa mengambil hak cipta orang lain melalui *internet*, dan berupa tindak kecurangan berupa memanipulasi data

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah

dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa metode dan teknik untuk melakukan analisis tergantung pada industri dan tujuan analisis.

Ada tiga tahapan dalam menganalisis data deskriptif kualitatif

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan.

C. Menarik Kesimpulan

Fase ini adalah tentang menemukan makna dari informasi yang dikumpulkan dengan mencari koneksi, persamaan atau perbedaan dan menarik kesimpulan dan jawaban dari masalah yang ada.

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan kemungkinan akan berubah jika tidak ditemukan bukti pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun ketika kesimpulan awal didukung

oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang masuk akal. Verifikasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga penilaian kesesuaian data dengan tujuan menjadi lebih akurat dan objektif sesuai dengan konsep dasar analisis.